

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PEMULIHAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR PASCABENCANA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Anggi Fadhilah Rifdah Rahim

NPP. 29.1436

Asdaf Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: anggifadhilahr@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on the problem of delays in the implementation of rehabilitation and reconstruction of post-disaster water resources infrastructure in 2018 until early 2021. **Purpose:** This research is intended to collect data and then analyze it so that later it can obtain results that can provide an overview of the rehabilitation and reconstruction of water resources infrastructure recovery in the form of national resilience, describe what factors are inhibiting and supporting, as well as efforts that can be made to overcome these inhibiting factors. **Method:** The research approach used in this research is qualitative research using descriptive methods. Data collection techniques use three events, namely, interviews, observations, and documentation. The data that has been collected will then be analyzed starting from data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Results / Findings:** From the results of this study, it can be concluded that the implementation of the rehabilitation and reconstruction of water resources infrastructure recovery has several obstacles that make the program run less than optimally. In this case, the Palu City BPBD has made efforts to extend the rehabilitation and reconstruction phase by making an R3P document for 2021-2024. **Conclusion:** The conclusion of this study is that the overall rehabilitation and reconstruction of water resources infrastructure has not been carried out properly but there are several indicators that have been implemented well as factors supporting the success of this program.

Keywords: Rehabilitation and reconstruction, Water resources infrastructure

ABSTRAK

Permasalahan/Latar belakang (GAP): penulis fokus pada permasalahan terhambatnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sumber daya air pascabencana tahun 2018 sampai awal tahun 2021. **Tujuan:** Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan kemudian dianalisis sehingga nantinya dapat memperoleh hasil yang dapat memberikan gambaran tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan infrastruktur sumber daya air dalam wujud ketahanan nasional, menguraikan factor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung, serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. **Metode:** Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga acara yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Dari

hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan infrastruktur sumber daya air terdapat beberapa hambatan yang membuat program tersebut berjalan kurang optimal. Dalam hal ini BPBD Kota Palu telah melakukan upaya untuk memperpanjang tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dengan membuat dokumen R3P 2021-2024. **Kesimpulan:** kesimpulan pada penelitian ini ialah rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan infrastruktur sumber daya air secara menyeluruh belum terlaksana dengan baik namun terdapat beberapa indikator yang telah terlaksana dengan baik sebagai faktor pendukung keberhasilan program ini.

Kata Kunci: Rehabilitasi dan rekonstruksi, Infrastruktur sumber daya air

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 28 September 2018 Provinsi Sulawesi Tengah dilanda gempa bumi, tsunami dan memunculkan fenomena baru yakni likuefaksi. Daerah yang mendapatkan kerugian paling besar adalah Kota Palu dimana gempa besar berturut-turut, yaitu 5,9 SR, 5,0 SR, dan gempa yang lebih kuat lagi 7,4 SR menyebabkan munculnya bencana kedua ialah tsunami. Fenomena likuifaksi menyebabkan jalan terbelah, beberapa bangunan dan pepohonan bahkan bergeser seakan terbawa arus dan merobohkan bangunan di atasnya. Banyak sekali kerusakan dan kerugian yang dirasakan masyarakat pada waktu itu. Dampak bencana selalu berpengaruh terhadap pembangunan. Infrastruktur yang dibangun dengan kurun waktu cukup lama dapat dihancurkan seketika dengan bencana. Gempa yang diiringi tsunami serta likuefasi berkekuatan 7,4 SR dengan kedalaman 10 km itu mampu merusakkan infrastruktur jalan, jembatan, bandar udara, dan infrastruktur pelabuhan. Selain berdampak pada kerusakan bangunan tersebut juga menimbulkan kerusakan pada infrastruktur sumber daya air atau sumber daya air itu sendiri.

Dampak kerusakan yang terjadi pada sektor infrastruktur sumber daya air (SDA) telah mengakibatkan penurunan produktivitas masyarakat di Kota Palu mengingat bahwa air merupakan salah satu kebutuhan dasar. Maka pembangunan kembali harus diutamakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Palu. Terbentuknya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk menanggapi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 33 yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana yang meliputi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berwenang untuk melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang berada di wilayah kerjanya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pasal 3 bahwa jangka waktu pelaksanaan

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yakni selama 3 tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021.

Namun pada pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang hingga saat ini sudah melewati target tahun pengerjaannya yaitu 2021 masih belum berjalan baik, sebab kebutuhan akan air masih sangat sulit bagi sebagian besar masyarakat, terutama yang tinggal di daerah hunian. Kendala sumber daya air juga masih dirasakan oleh petani dimana pada saat bencana lebih dari 8.000 hektare lahan sawah lumpuh akibat terhentinya pengairan dari irigasi Gumbasa, hingga akhir tahun 2020 baru 1.000 hektare yang sudah diairi setelah perbaikan saluran irigasi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini tentu saja berdampak pada penurunan produksi padi se-Sulawesi Tengah. Program rekonstruksi infrastruktur sumber daya air sangat membutuhkan rencana yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya air di seluruh kota. Pemilihan material dan sistem penyediaan air minum juga perlu mempertimbangkan ketahanan bencana. Jika terjadi bencana di masa depan maka kebutuhan air bersih yang merupakan kebutuhan dasar dapat dipenuhi secara cepat dan tidak terganggu.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

- a. Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat korban bencana di hunian tetap belum berjalan optimal.
- b. Terhambatnya pembangunan infrastruktur sumber daya air berdampak pada pengairan sawah di Kota Palu dan sekitarnya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penelitian Wahyu Rizana dkk pada Tahun 2021 berjudul Efektivitas Peran BPBD Dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Masyarakat Pascabencana Banjir di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana pada penelitian ini memperoleh hasil efektivitas BPBD sudah efektif hal tersebut dapat diketahui dari faktor pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi yang dilakukan BPBD pada proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat berjalan dengan baik. Penelitian oleh Dea Riska pada Tahun 2020 berjudul Peran BPBD Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kebakaran di Krukut Tamansari Jakarta Barat yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini memperoleh pada

penanggulangan pasca bencana kebakaran BPBD berperan sebagai koordinator yang mengkoordinir prosesnya rehabilitasi dan rekonstruksi dan melakukan koordinasi dengan lembaga dan pihak-pihak yang terkait juga sebagai pelaksana kebijakan peraturan tentang penanggulangan bencana. Dan penelitian dari Syifa Azmy Khoirunnisa dkk pada Tahun 2014 yang berjudul Kinerja Pemerintah dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Rawan Bencana (KRB) di Kabupaten Magelang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif metode deskriptif. Penelitian ini memperoleh hasil kinerja BPBD dinilai kurang baik karena hanya dapat memenuhi salah satu indikator dari 4 indikator yang menjadi pedoman kinerja.

1.4. Pernyataan kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, penelitian Wahyu Rizana dkk (2021) melakukan penelitian berfokus kepada efektivitas peran BPBD dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat, dimana berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang lebih berfokus kepada rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sumber daya air. Kemudian penelitian Dea Riska (2020) meneliti peran BPBD dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kebakaran, sedangkan penulis meneliti terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami serta likuifaksi. Dan penelitian Syifa Azmy Khoirunnisa(2014) yang Memiliki lokasi fokus penelitian di Kabupaten Magelang yang berbeda dengan penulis yang melakukan penelitian dengan lokasi fokus di Kota Palu. Pada perbedaan-perbedaan yang telah disebutkan diatas kemudian akan menghasilkan suatu pembaharuan dari segi lokus, metode penelitian, dan permasalahan yang akan diselesaikan menggunakan teori-teori yang berbeda.

1.5. Tujuan

Penelitian ini ialah Untuk mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan, faktor penghambat, serta upaya apa yang dilakukan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan infrastruktur sumber daya air pascabencana dalam mewujudkan ketahanan nasional di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

II. METODE

penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif ialah suatu metode penelitian yang digunakan dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, keadaan, sistem pemikiran atau

fenomena di masa kini dengan berpedoman pada teori dari Wingyo Adiyoso (2018) tentang prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan infrastruktur sumber daya air pascabencana dalam mewujudkan ketahanan nasional di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Informan yang ditetapkan dipilih berdasarkan informan yang dianggap paling mampu memberikan informasi tentang pertanyaan atas permasalahan yang dijadikan topik penelitian. Peneliti akan menggunakan teknik analisis dari miles and huberman (1992;16), yang merupakan tiga tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

penulis menggunakan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Wingyo Adiyoso (2018) dalam meneliti rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan infrastruktur sumber daya air pascabencana dalam mewujudkan ketahanan nasional di Kota Palu. Selain itu, pada penelitian ini akan berpedoman pada peraturan hukum yang memiliki relasi terhadap permasalahan yang diteliti. Dimana melihat rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan indikator-indikator tertentu.

3.1. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Infrastruktur Sumber Daya Air Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional Kota Palu

3.1.1. Tanggung Jawab

Pelaksanaan pemulihan infrastruktur sumber daya air merupakan bentuk tanggung jawab yang dilaksanakan oleh unsur-unsur yang mengemban misi dan fungsi BPBD Kota Palu, dimana unsur-unsur tersebut menjalankan fungsi komando yang diselenggarakan oleh bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Nantinya fungsi komando ini akan dilaksanakan dalam pengerahan sumber daya manusia, secara garis besar peran dan fungsi antar lembaga/instansi lain yang mendukung ialah Pemerintah Pusat yang terdiri dari Bappenas, Menteri Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemerintah Provinsi terdiri dari Bappeda Provinsi, Pekerjaan Umum Provinsi (Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air), dan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi (BPBD). Pemerintah Kota terdiri dari Bappeda Kota, Pemerintah Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota serta Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan. Dalam

pelaksanaan koordinasi BPBD membuat dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Tahun 2021-2024 yang memuat pengkajian kebutuhan pascabencana, pengalokasian sumber daya dan waktu pelaksanaan, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dokumen R3P tersebut digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan masyarakat agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi dapat terlaksana dengan baik.

3.1.2. Membangun Lebih Baik (*Build Back Better*)

Pembangunan perlu menjadi cara untuk tidak hanya mengembalikan masyarakat ke kondisi awal, tetapi juga untuk memitigasi risiko bencana sehingga dapat lebih tangguh di masa depan. Hal ini dilakukan melalui pemulihan di bidang rancangan struktur bangunan, tata ruang, sosial, ekonomi, serta kelembagaan. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan sumber daya air dalam membangun infrastrukturnya menerapkan pendekatan mitigasi bencana dengan konsep *Build Back Better* dan adaptasi bencana di masa depan. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tahap pembangunan selanjutnya yang memerlukan perencanaan lebih baik serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

3.1.3. Mendahulukan Kelompok Rentan

Pembangunan infrastruktur sumber daya air yang dilakukan secara bertahap berdasarkan pada skala prioritas khususnya untuk masyarakat kelompok rentan secara adil dimana dalam pengelompokannya pada tahap tanggap darurat difokuskan kepada masyarakat korban bencana yang evakuasi ke hunian sementara (Huntara) kemudian pada tahap pasca bencana rehabilitasi dan rekonstruksi difokuskan kepada penyediaan air baku untuk masyarakat korban bencana yang berada di hunian tetap (Huntap). diketahui bahwa dari pemerintah daerah sudah berusaha mengupayakan pemenuhan kebutuhan air bersih dan air baku bagi masyarakat di wilayah hunian tetap tetapi terkendala karena letak geografisnya yang tidak begitu menguntungkan sehingga proses pemenuhan pun terhambat. Untuk sementara waktu dalam pemenuhan kebutuhan air pemerintah kerap kali membagikan air bersih melalui mobil damkar yang berkeliling di seputaran huntap mengisi air di tandon masyarakat bagi yang memilikinya.

3.1.4. Mengoptimalkan Sumber Daya

Kebutuhan komponen untuk mendukung terlaksananya suatu program adalah suatu kewajiban, maksud tersebut adalah adanya kebutuhan sumber daya yang dapat memberikan perubahan dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Sarana dan prasarana, dana anggaran serta sumber daya

manusia merupakan daya dukung agar suatu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berhasil sesuai perencanaannya. Diketahui sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kota Palu masih belum memenuhi standar minimal oleh BNPB Pusat. Oleh karena itu, pada saat melaksanakan tugas dan fungsi dari BPBD belum bisa memberikan hasil yang maksimal. Diketahui dana anggaran yang disiapkan oleh pemerintah sudah mencukupi dengan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan pemulihan infrastruktur sumber daya air walaupun dalam realisasinya anggaran yang digunakan belum tercapai 100%. Pengoptimalan sumber daya yang telah diuraikan diatas di ketahui sumber daya yang tersedia di kantor BPBD telah terpenuhi namun tiap sumber daya memiliki kendalanya masing-masing. Oleh sebab itu, kinerja BPBD Kota Palu dalam penanganan penanggulangan bencana belum bisa dilaksanakan secara maksimal.

3.2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Infrastruktur Sumber Daya Air Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional Kota Palu

3.2.1 Peran Masyarakat

Pada fase pascabencana sangat diperlukan dukungan dan partisipasi dari tiap lembaga atau organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat guna menunjang kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi. Peran ataupun partisipasi dari masyarakat bisa dalam berbagai bentuk seperti adanya kegiatan positif maupun organisasi yang dibentuk khusus dalam rangka membantu progress dari rehabilitasi dan rekonstruksi. Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pemerintah memegang peranan penting terutama jika menyangkut masalah proses penanggulangan bencana. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa masyarakat turut ikut berperan dalam pembangunan kembali irigasi gumbasa walaupun tidak seluruh warga yang ada tetapi melalui perwakilan yang beranggotakan ketua RT dan RW di Kecamatan Gumbasa. Hal ini tentu saja memberikan dampak yang positif bagi percepatan pembangunan mengingat pengairan dari irigasi gumbasa untuk mengairi sawah – sawah yang berada di daerah gumbasa hingga daerah lainnya yang akan menormalkan kembali persawahan di Kota Palu.

3.2.2 Kerjasama Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan infrastruktur sumber daya air pascabencana dilaksanakan oleh berbagai unsur dan bukan hanya menjadi tugas dari BPBD Kota Palu, oleh sebab itu diperlukan kerjasama antar pemangku kepentingan diantaranya koordinasi dan komunikasi yang baik dapat mewujudkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan infrastruktur sumber daya air yang konsisten antar organisasi pelaksana. Kerjasama pemangku kepentingan pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan infrastruktur sumber daya

air telah terlaksana cukup baik hanya saja terkendala pada tahap evaluasi dalam proses pelaporan dari masing-masing instansi sehingga evaluasi dari BPBD terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi memakan waktu yang lebih lama untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat.

3.2.3 Konflik Sosial

Mengarah kepada faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan infrastruktur sumber daya air pascabencana konflik sosial selalu terjadi di kalangan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam program penanggulangan pascabencana juga tidak kalah penting dimana pemerintah bergerak mengeluarkan kebijakan namun masyarakat juga merupakan ujung tombak dari keberhasilan penanggulangan bencana. Dalam proses pemulihan infrastruktur sumber daya air di lapangan tidak luput dari adanya konflik. Ketika terjadi suatu konflik maka secara otomatis pengerjaan infrastruktur akan terhenti dan akan lebih berfokus kepada penyelesaian konflik tersebut. Oleh sebab itu walaupun masa tahap rehabilitasi dan rekonstruksi sudah berakhir tetapi infrastrukturnya masih belum siap dalam mendukung pelayanan masyarakat. Program manajemen bencana tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat terutama jika timbul konflik yang akan menunda pengerjaannya karena banyak donatur dari tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang tidak ingin mengeluarkan dananya jika masih terdapat konflik antara pemerintah dan masyarakat.

3.3. Upaya Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Infrastruktur Sumber Daya Air Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional Kota Palu

3.3.1 Keberlanjutan Program

Efek dari banyaknya pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertunda akibat berbagai faktor penghambat memaksa pemerintah untuk segera memperpanjang masa tahap rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bentuk keberlanjutan program dan pertanggungjawaban dari pemerintah. Untuk memperpanjang masa tahap rehabilitasi dan rekonstruksi maka dari pemerintah daerah pada tanggal 2 November 2021 telah mengeluarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Tahun 2021-2024. Perwali ini diharapkan nantinya menjadi pedoman dan mendapatkan satu kesatuan pemahaman dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bagi seluruh pihak yang terkait. Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui konsultasi bersama antara Pemerintah Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat. Koordinasi telah dilakukan sejak pelaksanaan penilaian dampak bencana, dampak dan penilaian kebutuhan pascabencana.

3.3.2 Tata Kelola Pemerintahan

Keberhasilan proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak akan terlepas dari faktor tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar ialah tata kelola yang mampu membuat masyarakatnya makmur dan sejahtera dengan hasil pencapaian yang diberikan ialah sistem pemerintahan yang *good governance*. Dalam mengelola pemulihan infrastruktur sumber daya air yaitu dengan tiap-tiap instansi dapat memahami tugas dan wewenangnya dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air. Namun tetap harus dikoordinasikan dengan instansi penanganan bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu sebagai pusat koordinasi.

3.3.3 Mengedepankan Keadilan

Untuk mengukur tahap rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai suatu program yang tepat sasaran ialah dengan mengobservasi secara langsung di lapangan apakah masyarakat yang menjadi target sasaran itu sudah merasakan realisasi dari program tersebut. Dalam menentukan keadilan pada proses pemenuhan kebutuhan sumber daya air pada masyarakat diketahui masyarakat yang bertempat tinggal di hunian tetap memiliki penghasilan dan kemampuan ekonomi yang berbeda-beda sehingga dalam menghadapi permasalahan kekurangan air yang terjadi di hunian tetap bagi sebagian masyarakat yang berkecukupan maka dapat dengan mudah mengupayakan kebutuhannya terhadap pemenuhan air dengan membangun tandon di pekarangan rumahnya sebagai tempat penampungan air. Adapun untuk mengisi penampungan air tersebut masyarakat harus mengeluarkan uang kisaran 30 ribu – 35 ribu untuk pengisian air tandon ataupun mengandalkan air hujan. Terlihat keadilan dalam masalah pemenuhan kebutuhan air di hunian tetap belum tercapai. Dimana program pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik untuk kebutuhan air belum terlaksana secara maksimal walaupun sudah tepat sasaran tetapi belum bisa mencakupi masyarakat seluruhnya.

IV. KESIMPULAN

Penulis berkesimpulan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan infrastruktur sumber daya air pascabencana dalam mewujudkan ketahanan nasional Kota Palu belum berjalan dengan baik dengan indikator yang belum berjalan dengan maksimal ialah pengoptimalan sumber daya, dan pemulihan dengan mendahulukan kelompok rentan. Adapun indikator yang telah berjalan baik ialah tanggung jawab dari pemerintah dan konsep pembangunan lebih baik (*Build Back Better*). Faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ialah konflik sosial dimana

terjadinya perselisihan di antara masyarakat dengan pemerintah mengenai area rekonstruksi Irigasi Gumbasa melintasi lahan masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah harus memperbaiki komunikasi dengan masyarakat hingga mendapatkan keputusan bersama untuk dilaksanakan suatu pembangunan.

Keterbatasan Penelitian. penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu melaksanakan penelitian yang diberikan waktu selama 2 minggu. Hal tersebut menyebabkan penulis minim melakukan observasi terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan infrastruktur sumber daya air pascabencana.

Arah masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait proses evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan infrastruktur sumber daya air.



V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, Wingyo.(2018), *Manajemen Bencana*. Jakarta: Bumi Aksara,-
- Afrizal. (2014), *metode Penelitian Kualitatif*.Jakarta: Rajawali Pers
- Darmadi, Hamid. (2013), *Metode Penelitian dan Social*. Bandung: Alfabet
- Herdiansyah, Haris. (2014), *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Heriyati, Sri.(2020), *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana*. Jakarta: IPDN
- Hikam, Muhammad. (2014), *Memperkuat Ketahanan Pangan Demi Masa Depan Indonesia 2015-205*. Penerbit CV Rumah Buku
- Ishak, Otto Syamsuddin. (2016), *Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasiona*. Jakarta
- Khoirunnisa, Syifa Azmy dkk. (2014), *Kinerja Pemerintah Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Rawan Bencana (KRB) di Kabupaten Magelang*. Jurnal. Universitas Diponegoro. Semarang
- Lestari, Dewi. (2020), *Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok Utara*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram. Nusa Tenggara Barat
- Maretti, Nadia. (2019), *Bencana Alam, Militer, dan Pertahanan Negara*. Jakarta
- Moeloeng, J.L. (2013), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurjanah, Dkk (2012). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta
- Priyono, Juniawan and Purnomo Yusgiantoro. (2017), *Geopolitik geostrategi geoekonomi*. Bogor:Unhan Press
- Riduwan. (2013), *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Riska, Dea. (2020), *Peran BPBD Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kebakaran di Krukut Tamansari Jakarta Barat*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Rizana, Wahyu and Zikri Alhadi. (2021), *Efektivitas Peran BPBD Dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Masyarakat Pasca Bencana Banjir di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam*. Jurnal. Universitas Negeri Padang
- Rohmat. (2019), *Penanggulangan Bencana Alam Klimatologis*. Penerbit : Duta
- Soepandji, Kris Wijoyo. (2018), *Konsep Bela Negara dalam Perspektif Ketahanan Nasional*. Jurnal Hukum dan Pembangunan
- Sigarlaki, Nastasia Thalia dkk. (2017), *Implementasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Banjir di Kota Manado*. Jurnal
- Sugiyono. (2015), *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ke-11. Bandung: CV Alfabeta
- Suradinata, Ermaya.(2001), *Geopolitik dan Geostrategi dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Ketahanan Nasional

Surtiari, Gusti A.K. (2019), *Pentingnya Penanganan Pascabencana Yang Berfokus Pada Penduduk Untuk Mewujudkan Build Back Better: Pembelajaran Dari Bencana Palu, Sigi, Donggala*. Jurnal Kependudukan Indonesia

Suryohadiprojo, Sayidiman. (1997), *Ketahanan nasional indonesia*. Jurnal Ketahanan Nasional

Tahir, Arifin (2014), *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung:CV Alfabeta

Warto, (2010). *Uji Coba Pola Manajemen Penanggulangan Korban Bencana Alam pada Era Otonomi Daerah*. Jakarta

Welirang, F. (2007). *Direktur PT. Indofood Sukses Makmur Bogasari Flour Mills. Jalan Tengah Sempurna Ketahanan Pangan Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Alam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Arshandi, Muhammad and Mohammad Ridwan."Kota Palu Bahas Upaya Rehab-Rekon Pascabencana Lewat Virtual". *Antara News*, Mei 2020. <https://www.antaraneews.com/berita/1472355/kota-palu-bahas-upaya-rehab-rekon-pascabencana-lewat-virtual>

Susanto, Heri. "2 Tahun Tsunami Palu: Perjuangan Pulihkan Pertanian di Tengah Pandemi". *Liputan6.com*. September 2020. <https://www.liputan6.com/regional/read/4368358/2-tahun-tsunami-palu-perjuangan-pulihkan-pertanian-di-tengah-pandemi>

